



Pengadaan Alkes Harus Sesuai Spesifikasi



H Suharso, S.I.P

KUBU RAYA-RK. Setakat ini Pemerintah Kubu Raya sudah mulai melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan. Tak pelak, Komisi III DPRD Kubu Raya akan mengawal proses pembangunan yang

dilaksanakan supaya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita berharap segala target APBD 2018 dapat terealisasi dengan baik dan lancar," ujar Ketua Komisi III DPRD Kubu Raya, H Suharso, S.I.P di Kantor DPRD Kubu Raya, Selasa (10/7).

Dalam kesempatan itu, wakil rakyat asal Dapil Kubu, Batu Ampar dan Terentang (Kubater) ini mengingatkan ihwal target pengerjaan pembangunan yang harus rampung dikerjakan paling lama Oktober mendatang.

"Saat ini sudah masuk pertengahan Juli. Tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pekerjaan pembangunan. Sebab paling lama Oktober pengerjaan pembangunan sudah harus selesai," tegasnya.

Legislator Partai Golkar ini berpendapat, selama ini proses pembangunan di Kubu Raya berjalan lancar. Serapan anggaran pun relatif baik, sehingga tahun anggaran APBD 2018 diharapkan serapan anggaran juga berlangsung baik sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan khusus untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kubu Raya, Harso mewanti-wanti pihak terkait agar melaksanakan pembangunan secara cermat dan teliti. Seperti dalam melakukan pengadaan alat kesehatan (Alkes). Sebab di beberapa daerah pengadaan Alkes rentan menjadi temuan yang mengarah ke praktik tindak pidana korupsi.

"Di beberapa daerah pengadaan Alkes selalu menjadi masalah. Makanya kita minta pengadaan Alkes Rumah Sakit Kubu Raya nanti dikerjakan sesuai dengan speknya," imbuhnya.



dr Berli Hamdani

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, dr Berli Hamdani mengungkapkan, untuk menghindari potensi permasalahan hukum dalam pembangunan RSUD Kubu Raya maka akan dilakukan pengawasan secara ketat dan

berlapis.

"Dari awal kita sudah melakukan penyiapan pengawasan. Jadi, tindak pengawasan pertama melalui inspektorat. Kedua, kita juga melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pengawasan. Dan ketiga pengawasan dari BPK serta keempat pengawasan TP4D dari Kejaksaan," jelasnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kubu Raya juga membentuk tim khusus monitoring evaluasi terkait pembangunan RSUD Kubu Raya tipe D Pratama ini.

"Jadwalnya sudah kita buat. Satu bulan sekali tim monitoring ini wajib melaporkan progres pembangunan," tegasnya. (sul)